

**Judul** : Stabilkan harga beras, regulasi harga mulai dari tingkat produksi  
**Tanggal** : Sabtu, 23 Agustus 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Stabilkan Harga Beras Regulasi Harga Mulai Dari Tingkat Produksi



Alex Indra Lukman

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyoroti kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi terbaik agar harga beras stabil di masyarakat.

Menurut Alex, regulasi yang jelas mengenai HET sangat penting agar alur penyerapan gabah dan distribusi beras dapat berjalan rapi dan terencana. Saat ini, harga produksi (Gabah Kering Panen/GKP) ditetapkan

Rp 6.500 per kilogram atau sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

"Dengan harga gabah Rp 6.500 per kilogram, tidak relevan jika HET beras tetap Rp12.000. Ini bisa jadi bumerang di lapangan. Karena itu, masalah HET ini harus segera dibeskan," ucap Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Menurut Alex, harga gabah Rp 6.500 per kilogram adalah

harga terendah yang dijamin Pemerintah. Jika petani bisa menjual gabah lebih tinggi, hal itu justru baik karena meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kalau petani kita bisa jual harga gabah Rp 8.000, ya monggo," ujarnya.

Dia mendorong agar regulasi harga dirumuskan di tingkat produksi. Pemerintah perlu menetapkan batas atas harga beras, baik kategori premium maupun medium, dengan kriteria yang jelas.

"Jangan kemudian malah memberatkan pengusaha kecil yang beli gabah Rp 6.500," ucapnya.

Alex menekankan, HET sebenarnya berfungsi sebagai peringatan dini bagi Pemerintah. Jika harga beras di pasaran melampaui HET, pemerintah harus intervensi dengan mengguyur pasar menggunakan stok cadangan beras yang ada.

"Kalau HET itu terlampaui, maka Pemerintah mengguyur pasar dengan (cadangan) yang 4 miliar kilogram tadi," ucapnya.

Alex juga mengingatkan, Pemerintah semestinya memanfaatkan keberadaan Koperasi Merah Putih (KMP) dalam penyaluran beras SPHP. Tidak perlu lagi memberikan

tugas tambahan kepada TNI/Polri untuk mendistribusikan beras program SPHP yang telah digulirkan pemerintah melalui Bulog sejak 2023.

"Bapak Presiden, kemarin sudah meresmikan 80.000 koperasi merah putih. Sementara, Pak Dirut Bulog menyebut baru ratusan koperasi yang dilibatkan dalam program beras SPHP ini. Nah, terus untuk apa mereka ada 80.000 itu? Ya suruh jalur yang SPHP ini," tutur Alex.

Dia bilang, pelibatan TNI/Polri selama ini memang efektif menahan gejolak harga beras, namun juga menimbulkan biaya tambahan karena harus memobilisasi beras SPHP dari gudang Bulog ke kantong distribusi. ■ BYU